

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Transportasi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat (Barros, Winaya, dan Firdausi, 2020). Terutama untuk perjalanan sehari-hari. Angkutan umum merupakan salah satu moda transportasi yang digunakan dalam melakukan mobilitas (Said, Maitimu, dan Talakua, 2023). Oleh karena itu, kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi yang baik sangat tinggi. Angkutan merupakan suatu sarana transportasi yang digunakan masyarakat dengan sistem berbayar yaitu berupa tarif (R Upuolat, 2023).

Dalam penyelenggaraan operasional angkutan pedesaan diperlukan penetapan tarif bagi pengguna jasa. Penetapan tarif yang baik harus disesuaikan dari tiga sudut pandang, baik dari sisi operator (terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan angkutan umum), sisi pengguna (terkait dengan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar biaya jasa angkutan umum) dan sisi regulator (pemerintah terkait dengan kebijakan untuk masyarakat) (Safitri, 2016). Tarif adalah besaran biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. Penetapan tarif dimaksudkan untuk mendorong terciptanya penggunaan prasarana dan sarana pengangkutan secara optimum dengan mempertimbangkan lintasan yang bersangkutan (Departemen Perhubungan, 2002).

Beroperasinya angkutan umum tidak lepas dari penarikan biaya dan penetapan tarif angkutan umum tersebut. Di Kabupaten Tuban terdapat 18 trayek angkutan pedesaan berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penetapan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Tuban, namun kenyataannya pada kondisi eksisting hanya terdapat lima trayek yang masih beroperasi. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menetapkan tarif berdasarkan Peraturan

Bupati Tuban Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan dalam Kabupaten Tuban, namun kenyataannya penetapan tarif pada angkutan pedesaan di Kabupaten Tuban ditetapkan secara sepihak oleh operator dan tarif pada semua trayek sama. Tarif yang dikenakan yaitu Rp15.000 pada semua trayek guna menutupi biaya operasional kendaraan yang belum seimbang. Hal ini menjadi masalah karena jarak yang ditempuh berbeda namun dikenakan biaya yang sama.

Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan mengenai tarif angkutan pedesaan di wilayah studi Kabupaten Tuban. Untuk menciptakan tarif yang layak bagi operator dan pengguna jasa, harus ada keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk angkutan umum dan fasilitas yang diterima. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini dengan judul "**EVALUASI TARIF ANGKUTAN PEDESAAN KABUPATEN TUBAN**".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan tarif yang berlaku saat ini dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Tarif yang berlaku saat ini adalah tarif yang ditetapkan oleh operator secara sepihak.
3. Belum tersedianya pembaharuan terkait SK tarif angkutan oleh pihak regulator.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dengan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur?
2. Bagaimana perhitungan tarif menggunakan *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP)?
3. Bagaimana rekomendasi tarif Angkutan Pedesaan di Kabupaten Tuban?

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk melakukan kajian terkait penetapan tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Tuban, berdasarkan analisis BOK, ATP dan WTP.

Tujuan dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini yaitu:

1. Menganalisis tarif yang sesuai berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan.
2. Mengetahui besaran tarif yang berdasarkan ATP dan WTP.
3. Mengetahui tarif rekomendasi yang seimbang dan tidak merugikan semua pihak.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan data, analisis data dan pengolahannya. Adapun batasan masalah dalam penulisan ini yaitu:

1. Evaluasi dilakukan pada semua trayek aktif pada angkutan pedesaan di Kabupaten Tuban.
2. Penelitian ini hanya menganalisis tarif menggunakan Biaya Operasional Kendaraan dan analisis *Ability to Pay* (ATP) serta *Willingness to Pay* (WTP).
3. Penelitian ini hanya menyesuaikan tarif sesuai dengan BOK, ATP dan WTP berdasarkan perbedaan jarak dari trayek tersebut.